



Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Konsep Spiritualitas Sekolah Dasar di Kabupaten Karangasem

Ni Luh Putu Nita Yulianti ^{1*}, Tini Adiatma ¹

¹Universitas Musamus, Indonesia

 yuliantinita@unmus.ac.id*

Abstract

This research investigate the management of School Operational Rock (BOS) funds with a spiritual concept seen from the accountability and transparency of School Operational Rock (BOS) fund reports. Data collection was carried out using in-depth interview methods. The selection of informants was determined using purposive sampling techniques and verifying the validity of the analysis results using source triangulation. The research results show that accountability and transparency cannot only be assessed based on School Operational Assistance (BOS) reports but should look at the management of human resources, namely the School Operational Assistance (BOS) management team who have minimal knowledge of Technology and Accounting in making reports so that Special personnel are required who have skills in the IT field. Furthermore, conflict management (differences in interests) can occur between the principal and treasurer in some schools, this can be caused by personal problems or lack of communication within the school environment and can affect the management of School Operational Funds (BOS), with the existence of trust. By applying the teachings of Hinduism in managing School Operational Assistance (BOS) fund reports, adhering to Hindu beliefs, namely Tri Kaya Parisuda (kayika, manacika, and wacika) and the Karmaphala Law, it is believed that it will produce accountable and transparent reports with good spiritual management from the team. Management of School Operational Rocks (BOS).

Keywords: Operational Assistance Fund, Management of School Operational

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 20,
2024

Revised

August 03, 2024

Accepted

August 31, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemerintah selalu merencanakan berbagai upaya untuk menemukan berbagai upaya untuk menemukan solusi dari masalah Pendidikan. Salah satu solusi pemerintah dalam pemerataan Pendidikan tersebut memberikan suatu program pengalokasian anggaran yang disebut Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program dana BOS merupakan suatu program yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada Lembaga Pendidikan sebagai pelaksana wajib belajar (Womsiwor, 2020).

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya, pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada awalnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini adalah bentuk kompensasi kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan awal adalah untuk mempercepat pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Pemerintah mengeluarkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan meringankan beban biaya pendidikan

yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah menurut Siti, Hidayatu Hasana (2015).

Menurut Akhmad Muftizar (2015), Pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Karangasem sebagai Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kabupaten/kota yang bertanggungjawab untuk mengarahkan kepada sekolah-sekolah SD maupun SMP yang ada di Kecamatan dalam melakukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS Nomor 80 tahun 2017. Pada tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem sebagai tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi langsung ke beberapa sekolah dasar di Kecamatan di Kabupaten Karangasem, di antaranya Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Bebandem, dan Kecamatan Abang, tenaga Asset dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditugaskan untuk turun ke lapangan, permasalahan yang didapatkan yaitu kurang lengkapnya pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh sekolah-sekolah khususnya dalam pembukuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan dalam melakukan evaluasi yaitu untuk mengontrol penggunaan dan memeriksa kelengkapan laporan serta pembukuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) apakah telah dibuat sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 atau tidak, karena pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentunya harus dilaporkan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem dan selanjutnya Dinas melaporkan kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya di audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil temuan audit dari Inspektorat Daerah pada laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Karangasem yaitu ada 17 Sekolah Dasar di kabupaten Karangasem yang belum membuat Laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Juknis, berikut nama-nama sekolah dasar tersebut sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nama Sekolah Hasil Temuan Audit dari Inspektorat Daerah pada laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Karangasem

No	Nama Sekolah	Keterangan
1	Sdn 6 Muncan	Perbaikan
2	Sdn 4 Pempatan	Perbaikan
3	Sdn 1 Pippid	Perbaikan
4	Sdn 8 Pempatan	Perbaikan
5	Sdn 3 Talibeng	Perbaikan
6	Sdn 4 Rendang	Perbaikan
7	Sdn 2 Pesaban	Perbaikan
8	Sdn 5 Rendang	Perbaikan
9	Sdn 3 Tiyingtali	Perbaikan
10	Sdn 2 Tista	Perbaikan
11	Sdn 1 Tista	Perbaikan
12	Sdn 4 Duda Utara	Perbaikan
13	Sdn 1 Duda Utara	Perbaikan

14	Sdn 3 Muncan	Perbaikan
15	Sdn 2 Telaga Tawang	Perbaikan
16	Sdn 7 Pempatan	Perbaikan
17	Sdn 6 Pempatan	Perbaikan
18	Sdn 6 Jungutan	Perbaikan
19	Sdn 4 Ban	Perbaikan
20	Sdn 3 Sinduwati	Perbaikan
21	Sdn 2 Wisma Kerta	Perbaikan

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem

Menurut (Mulyasa, 2004:194), Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Rata-rata sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan sekolah dalam pembelajaran dengan maksimal baik, hanya karena masalah keuangan, baik untuk membayar guru dan untuk pengadaan sarana kegiatan belajar mengajar. Permasalahan yang terjadi dalam program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada umumnya adalah terjadi perbedaan persepsi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan konsep spiritualitas yaitu dengan melihat dari sisi perilaku Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar, karena masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diketahui oleh masyarakat dan Manajemen sekolah yang peneliti temukan, dapat dikatakan hancur karena terdapat perbedaan nilai antara bendahara dengan kepala sekolah sehingga menimbulkan konflik kepentingan, maka itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengelolaan dana BOS ini dengan konsep Spiritualitas atau religius. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu juga adanya evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agar dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) apakah sudah sesuai dengan Juknis dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 dan bagaimana agar dapat tercapainya akuntabilitas dan transparansi yang berbasis konsep spritual.

Tinjauan Pustaka

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Petunjuk Teknis menurut Draf Juknis Permendikbud Tahun 2017 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi sekolah.

Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah: "Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan."

Manajemen Sumber Daya Manusia dan Sifat – Sifat Manajemen

Manajemen yang dikenal saat ini adalah hasil produk barat yang sifatnya individualistis, kapitalistis dan profanis. Sifat ini menunjukkan bahwa suatu usaha dikelola dengan konsep kebutuhan atau tujuan yang bersifat duniawi. Dengan perkataan lain, seluruh

pertimbangan dan kebijaksanaan yang dirumuskan dalam sebuah organisasi terarah hanya memecahkan masalah dan peluang yang bersifat duniawi (jagadhita). Proses kegiatan manajemen tidak pernah menyentuh tujuan yang bersifat surgawi, akhirat (moksa), karena tujuan surgawi merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi, bukan tanggung jawab organisasi. Jadi, proses kegiatan manajemen dengan konsep pemikiran barat tersebut adalah mengabaikan kepentingan hubungan manusia dengan Tuhan. Dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa dalam perspektif sipiritual-religius, tujuan yang ingin dicapai oleh manusia secara individual maupun organisasional adalah tidak hanya menyangkut aspek kedamaian di Bumi melainkan juga kedamaian di surga (akhirat), Gorda, I Gusti Ngurah (2006).

Konsep Spiritualitas

Menurut Sarwono (2004) , perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan yaitu yang dikaitkan dengan Ajaran Agama Hindu yaitu Tri Kaya Parisudha yang terbentuk dari Hukum Karma Phala.

Ida Ayu, Budhananda Munidewi (2017) Hukum Karma Phala, yang merupakan salah satu dari lima keyakinan (Panca Sradha) dari agama Hindu. Karma Phala berasal dari dua kata yaitu karma dan phala, dimana karma berarti perbuatan atau aksi dan phala berarti buah atau hasil. Jadi, karma phala berarti buah dari perbuatan, baik yang akan dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dalam keyakinan agama Hindu, Hukum Karma Phala memberikan optimisme kepada setiap manusia bahkan semua makhluk hidup untuk yakin bahwa semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima. Umat Hindu meyakini bahwa yang menerima adalah yang berbuat dan efeknya kepada orang lain. Menurut kitab suci Bradh Aranyaka Upanisad, hukum diartikan sama dengan kebenaran. Konsep ajaran *Tri Kaya Parisudha* adalah ajaran etika dari semua kehidupan manusia. Ajaran ini mengajarkan dan mendidik manusia agar selalu berperilaku pada kebenaran.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Konsep Spiritualitas Sekoah Dasar Di Kabupaten Karangasem

METODE

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Karangasem yang terdiri dari delapan Kecamatan yaitu Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Rendang dan Kecamatan Sidemen. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana informan yang dipilih dianggap memenuhi kriteria tertentu dari peneliti, sehingga data yang diberikan oleh informan merupakan data yang tepat, akurat, mencukupi, dan sesuai seperti yang diharapkan peneliti. Data dikumpulkan menggunakan instrumen wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab pada responden dimana jawaban responden ditulis atau dicatat Sugiyono (2001). Menurut Sugiyono (2013: 88) teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan sumber dari 52 lapangan terkait fokus permasalahan. teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017

Laporan penggunaan Dana BOS di Kabupaten Karangasem sudah sesuai dengan aturan Pusat yaitu yang tertuang dalam Juknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, di dalam pengelolaan tentunya memiliki kendala karena banyak sekolah yang dari keterbatasan pihak sumber daya manusia manajemen BOS dalam membuat laporan yang minim pengetahuan tentang sistem yang selalu berubah dari provinsi teruma pada saat pelaporan online banyak sekali masalah dalam pelaporan online mulai dari sumber daya manusia yang kurang paham dengan IT, dan yang lebih parah adalah sinyal sekolah yang berada di pedalaman. Dinas terkait diharapkan merekrut tenaga yang khusus ditempatkan di sekolah dasar yang memiliki kemampuan di bidang IT dan akuntansi agar dapat membantu sekolah untuk membuat pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diharapkan agar mengadakan sosialisasi ataupun kegiatan workshop mengenai tata cara atau manajemen pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Karangasem.

Akuntabilitas dan Transparansi

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban pelayanan publik diantaranya:

Akuntabilitas Kinerja publik dapat dilihat berdasarkan proses lain meliputi Dasar sudah menggunakan dan melaporkan dana BOS sesuai dengan Juknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017. Laporan realisasi dan perencanaan Dana BOS dilaporkan sekolah kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem, setelah itu pihak Dinas yang melaporkan ke Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem untuk dijadikan laporan keuangan dan dilaporkan kepada pusat. Laporan dana BOS yang sudah dijadikan laporan keuangan oleh BPKAD maka yang bertugas mengaudit adalah dari pihak audit internal di Kabupaten yaitu Inspektorat Daerah dan jika laporan dana BOS yang dijadikan sampel oleh IRDA menyimpang dari standar yang ditetapkan Juknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017

maka IRDA yang berhak untuk merekomendasi agar sekolah memperbaiki laporan upaya untuk mencegah terjadinya temuan oleh audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Penggunaan dana BOS yang sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sudah akuntabel dan transparan karena dinas sudah melaporkan realisasi sesuai dengan laporan keuangan dan dipublikasikan lewat laporan keuangan daerah. Sudut pandang penggunaan dana BOS di sekolah belum transparan dan akuntabel. Karena tidak semua sekolah melakukan pembukuan yang tepat dan benar. Selain itu juga masih banyak sekolah yang belum mempublikasikan laporannya lewat papan pengumuman di sekolah. Penggunaan dana BOS harus dikelola secara transparan atau terbuka oleh sekolah, dimulai dengan melibatkan komite dalam menyusun RKAS, menempel laporan yang diharuskan di papan pengumuman sekolah, dan menyiapkan laporan yang mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Laporan dana BOS yang tidak sesuai dengan juknis merupakan salah satu penyebab dari laporan yang kurang akuntabel dan transparan, sebab jika laporan disusun tidak sesuai juknis tentu saja akan mengarah pada kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan BOS.

Manajemen BOS (Sumber Daya Manusia)

Konflik yang terjadi dengan tim manajemen BOS baik Kepala Sekolah, Bendahara BOS maupun guru dapat menunjukkan sifat bahwa suatu usaha dikelola dengan konsep kebutuhan atau tujuan yang bersifat duniawi. Tim Manajemen BOS sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS di sekolah dasar yaitu tentang akuntabilitas antara Bendahara dengan Kepala Sekolah memiliki nilai yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Dari beberapa sekolah dasar Kabupaten Karangasem hampir 80% sekolah yang memiliki permasalahan internal dalam tim manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Perlu adanya usaha untuk mendekatkan kearifan lokal (*local wisdom*) dengan birokrasi sehingga pemerintahan dapat berkembang dan memiliki manfaat untuk kesejahteraan sosial jangka panjang. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang tidak hanya dapat meningkatkan kecerdasan pegawai tetapi juga dapat meningkatkan nilai moralitas dan etika pegawai. Manajemen konflik (perbedaan kepentingan) dapat terjadi antara kepek dan bendahara di beberapa sekolah, hal ini bisa disebabkan oleh masalah pribadi atau kurangnya komunikasi yang terjalin dalam lingkungan sekolah tersebut. Manajemen konflik atau hubungan kurang harmonis antara guru, bendahara, dan kepala sekolah dapat menjadi penyebab lain laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang akuntabel dan transparan. Perbedaan kepentingan atau manajemen konflik antara Kepala Sekolah dengan Bendahara di dalam pengelolaan Dana BOS yang dapat menyebabkan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dalam penyetoran SPJ tidak tepat waktu, karena begitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cair ditarik oleh Kepala Sekolah langsung dikelola sendiri tanpa memperhatikan RKAS yang sudah disusun sehingga menyimpang dari perencanaan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditarik oleh Bendahara dan dikelola sendiri oleh Bendahara tanpa adanya koordinasi dengan Kepala Sekolah ataupun Dewan Guru menyebabkan Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang Transparan dan kurang Akuntabel. Jadi diperlukan sinergi dari kedua belah pihak agar tim manajemen BOS selaras dengan menerapkan komunikasi yang baik agar tercipta pencapaian yang sesuai dengan standar.

Tri Kaya Parisudha dan Hukum Karmaphala

Ajaran *Tri Kaya Parisudha* antara lain: *Kayika Parisudha* (berbuat secara suci), *Manahcika Parisudha* (berpikir secara suci), dan *Wacika Parisudha* (berkata suci). *Kayika* diterapkan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS diyakini akan menghasilkan laporan yang baik secara spiritual karena tingkah laku yang suci (*Kayika*) menuntun kita kejalan yang benar saat menyusun ataupun mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Kayika* menjadi dasar dalam setiap perbuatan kita tentu kita akan berupaya mengelola

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan aturan dan berusaha semaksimal mungkin menghindari penyelewengan anggaran.

Manacika diterapkan oleh kepala sekolah dan bendahara dalam mengelola dana BOS dapat menghasilkan laporan yang baik secara spiritual karena pikiran yang suci (Manacika) merupakan dasar dari perilaku yang lainnya (perkataan dan perbuatan), dari pikiran yang murni akan terpantul serta terpancarkan sinar yang menyejukkan saat mengelola dan menyusun laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik secara spiritual. Segala hal yang diniatkan dengan baik tentu akan bermuara dengan baik, demikian pula dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), niat atau pikiran yang baik (Manacika) dapat diaplikasikan dalam melakukan perencanaan yang tepat sesuai juknis bersama guru dan komite dan kemudian menjadi dasar saat melakukan realisasi dan pelaporan.

Wacika diterapkan oleh kepek dan bendahara akan menghasilkan laporan yang baik secara spiritual karena dari perkataan yang suci (Wacika) akan melahirkan perbuatan dan pikiran yang suci pula, sehingga kata-kata yang baik dalam menjalin komunikasi antara tim manajemen BOS agar tidak terjadinya sebuah konflik manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan melahirkan laporan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Perbuatan atau perkataan apapun yang kita ucapkan atau lakukan hendaknya didasari oleh niat yang baik, dilakukan dengan cara yang benar, dan dikomunikasikan dengan benar. Komunikasi atau perkataan yang baik (Kayika) antara semua pihak di sekolah akan menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Komunikasi yang baik pula akan menghindarkan kita dari manajemen konflik baik antara bendahara, guru, maupun kepala sekolah.

Karma Phala merupakan bagian ke tiga dari Panca Sradha yaitu lima keyakinan dan kepercayaan umat hindu tentunya sebagai umat hindu harus yakin dengan adanya hukum karma phala. Dalam kitab sarasamuscaya disebutkan bahwa "***Tan Hana Karma Tan Pa Phala***" yang artinya Tidak Ada perbuatan tanpa mendapatkan hasil. Termasuk dalam pembuatan laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) apabila tidak baik dalam perencanaan pelaksanaan maupun pelaporannya sudah pasti akan mendapatkan akibat yang tidak baik. Artinya pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berhak untuk memberikan reward and punishment kepada pihak yang membuat pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dasar yaitu Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu pihak Dinas memberikan hukuman apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan atau ketidaksesuaian penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka diharapkan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memberikan sanksi yang tegas bagi sekolah dasar di setiap Kecamatan di Kabupaten Karangasem. Sanksi tersebut berupa Surat Teguran (hukuman) bagi sekolah yang melanggar Juknis Permendikbud No. 8 Tahun 2017.

Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sarankan mengambil masalah penelitian tidak hanya pada aspek transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan sekolah, tetapi hendaknya meneliti variabel tentang kecerdasan spiritual dan konsep spiritual lainnya seperti Tat Twam Asi, karena sebagai tenaga pelayanan publik dituntut untuk benar-benar memiliki etika dan perilaku yang baik, sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Daerah setempat.

KESIMPULAN

Laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibuat di sekolah dasar Kabupaten Karangasem setiap sekolah dasar sudah mengupayakan perencanaan, penggunaan serta pelaporan yang tertuang dalam Juknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, di dalam pengelolaan tentunya memiliki kendala karena banyak sekolah yang dari keterbatasan

pihak sumber daya manusia manajemen BOS dalam membuat laporan yang minim pengetahuan tentang sistem yang selalu berubah dari provinsi teruma pada saat pelaporan online banyak sekali masalah dalam pelaporan online mulai dari sumber daya manusia yang kurang paham dengan IT, dan yang lebih parah adalah sinyal sekolah yang berada di pedalaman. Dinas terkait diharapkan merekrut tenaga yang khusus ditempatkan di sekolah dasar yang memiliki kemampuan di bidang IT dan akuntansi agar dapat membantu sekolah untuk membuat pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga diharapkan agar mengadakan sosialisasi ataupun kegiatan workshop mengenai tata cara atau manajemen pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Karangasem.

Laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah kurang akuntabel dan transparan bukan hanya dari kesesuaian laporan dengan Juknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 yaitu manajemen konflik antara tim manajemen BOS di sekolah dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang khusus mengetahui tentang IT di sekolah, sehingga dengan adanya kepercayaan dengan menerapkan ajaran agama Hindu dalam pembuatan atau mengerjakan laporan bos berpegang pada kepercayaan hindu yaitu Tri Kaya Parisuda (kayika, manacika, dan wacika) dan Hukum Karmaphala akan menghasilkan laporan yang akuntabel dan tranparan secara spiritual.

REFERENSI

- Aminudin, A., & Nurwati, N. (2019). Pemanfaatah Sampah Plastik Menjadi Kerajinan Anggraini, R.D. (2013). Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1 (2), ISSN 2303 - 341X.
- Abraham, M. (2013). *Dalam fami Teori Hirarki Motivasi*. New York: Harper & Row Publisher.
- Belah, R.N. (1992). *Religi Tokugawa: Akar - akar Budaya Jepang*. (Alih Bahasa Wardah Hafidz dan Wiladi Budiharga). Jakarta: Karti Sarana dan Gramedia Pustaka Utama.
- Bhudananda, I.A. (2017). Akuntabilitas Dalam Perspektif Ajaran Karma Phala Sebagai Pedoman Untuk Membangun Karakter Auditor, Universitas Mahasaraswati, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12 (1), p-ISSN 2302-514X e-ISSN 2303-1018.
- Bratakusumah, D.S., and Dadang Solihin. (2002). *Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Fadiman, J., and Robert Frager. (2002). *Indahnya Menjadi Sufi*. Yogyakarta: Pustaka Suf.
- Fernando, M. (2015). *The influence of religion-based workplace spirituality on business leaders' decision-making: An inter-faith study decision-making: An inter-faith study*. <https://doi.org/10.1017/S1833367200004144>.
- Geh, E. (2009). *Spirituality at work in a changing world: managerial and research implications*, Darden School of Business, University of Virginia: 287-300.
- Ghani, M.A. (2006). *The Spirituality in Business - Pencerahan Hati Bagi Pelaku Usaha*. Jakarta: Penerbit Pena.
- Gorda, I.G.N. (2006). *Etika Hindu dan Perilaku Organisasi*. Denpasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja.
- Hasibuan, M. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hepi, Wahyuningsih. (2009). Validitas Konstruk Alat Ukur Spirituality Orientation Inventory (SOI). Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Psikologi*, 36 (2): 116 - 129.
- Kuncoro, B. (2013). *Metode riset untuk bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?*, Edisi 4. Jakarta: Erlanga.
- Kaswandi. (2015). Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 027 Tarakan. *Jurnal Kebijakan dan Pendidikan, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 3 (1):

- 66-74, ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615.
<https://www.google.co.id/#q=jurnal+dana+bos+dari+kaswandi>.
- Krina, L.L.P. (2013). *Indikator dan Alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Maheswari, W.W. (2009). *Peran dan Posisi Sekolah dan Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah Studi di Kota Surabaya*, Tesis, Universitas Airlangga.
- Manurung, H. (2013). Pelaksanaan Program Dana BOS Pada sekolah dasar Yayasan Bina Mitra Wahana Pekanbaru. Universitas Riau, *Jurnal Kebijakan Umum*, 4 (2): 119-218.
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=180178&val=2289&title=P ELAKSANAAN%20PROGRAM%20DANA%20BANTUAN%20OPERASIONAL%20SEKOLAH%20\(BOS\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=180178&val=2289&title=P%20ELAKSANAAN%20PROGRAM%20DANA%20BANTUAN%20OPERASIONAL%20SEKOLAH%20(BOS)).
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Merta, Wibawa I Gst Pt Agung (2016), *Tri Kaya Parisudha Sebagai Landasan Pendidikan Religius Agama Hindu*. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Milliman, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. *Journal of Organizational Change Management*, 16 (4):426-447.
- Minarti, S. (2011). *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L.J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2005). *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyasa, E. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Rodya Karya.
- Nawawi, H. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurul, H. (2015). Analisa Akuntabilitas dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS, Universitas Brawijaya Malang, *Ekonomika-Bisnis*, 6 (1): Hal 75-88.
- Pabundu, T. (2005). *Metode Penelitian Geografis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Petunjuk Teknis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor 80 tahun 2017.
- Pratama. (2013). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintah dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Tanjungpinang Timur*, Skripsi Fakultas Ekonomi Tanjungpinang Timur.

- <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Fadhli-Wira-P-080420103093.pdf>.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Suzana, A.M. (2015). Pemanfaatan Dana BOS dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai, Tamanpraja, *Jurnal Pemerintahan & Otonomi Daerah*, 5 (1).
- Santi, E. (2016). *Transparansi dan akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS. Studi Kasus Di SMP N 03 Kota Tangerang Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hodayatullah.
- Santosa, H.P. (2011). *Implikasi media sosial pada perkembangan Ilmu Komunikasi' dalam Fajar & Dr.Elvinaro A. (eds) Komunikasi 2.0: Teorisi dan Implikasi*.Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Sarwono, S.W. (2004). *Psikologi remaja. Edisi revisi 8*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka,
- Siti, H.H. (2015). *Analisis Implementasi Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Terhadap Efektifitas Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri Sewulan Dagangan Kabupaten Madiun*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-15. Bandung: AlfaBeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieka Putra.
- Suharsimi, A.. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieka Putra.
- Sulkan, E.P. (2016). *Internalisasi Nilai Spritual Mengubah Konsep Diri Karyawan (Studi Kasus Pelaksanaan Spiritual Capital Management PT. Telkom Indonesia di Datel Salatiga)*, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Silele, E. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat), *Jurnal EMBA*, 5 (2): 1626–1635.
- Tanjung, A.H. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Vlasblom, J. P. (2012). *Spiritual care in a hospital setting: Nurses and patients perspectives*. Nursing Reports.
- Zohar, D., and Marshall. (2004). *Spiritual Capital*. Bandung: Mizan.

Copyright Holder :

© Ni Luh Putu Nita Yulianti, Tini Adiatma (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA